



Keadilan Sosial dalam Pendidikan: Analisis Filosofis Terhadap Akses Dan Kualitas Belajar Di Era Globalisasi

Khaeruddin Said¹, Muhammad Musfiatul wardi², Mustapa Ali³, Mardiyah Hayati⁴, Mappanyompa⁵

^{1,2,3,4,5}PGMI, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

rudisaid62@gmail.com¹, Muspel14@gmail.com², alimustapa@gmail.com³, mardiyahhayati4@gmail.com⁴,
myompakaltim@gmail.com⁵

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 16-10-2025
Disetujui: 31-10-2025

Kata Kunci:

*Social Justice,
Education, Learning,
Globalization.*

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan sosial dalam pendidikan melalui pendekatan filosofis, dengan fokus pada akses dan kualitas pembelajaran di era globalisasi. Keadilan sosial dipandang sebagai prinsip dasar yang mengharuskan distribusi yang adil atas kesempatan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari literatur filosofis, kebijakan pendidikan, dan studi sebelumnya yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi kritis dan pemahaman konsep keadilan yang diusulkan oleh filsuf seperti John Rawls dengan prinsip keadilan sebagai keadilan dan Paulo Freire dengan gagasan pendidikan sebagai praktek pembebasan. Temuan menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dua sisi: di satu sisi, ia memperluas akses ke sumber daya pembelajaran digital dan jaringan internasional; di sisi lain, ia memperdalam ketidaksetaraan akibat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem pendidikan untuk menyeimbangkan tuntutan global dengan nilai-nilai lokal sambil memperhatikan kelompok-kelompok terpinggirkan. Oleh karena itu, pendidikan yang adil harus inklusif, transformatif, dan kontekstual, memungkinkan penciptaan ruang pembelajaran yang adil dan mendorong perkembangan masyarakat yang adil secara sosial di tengah arus globalisasi.

Abstract: This study aims to analyze social justice in education through a philosophical approach, focusing on access and quality of learning in the era of globalization. Social justice is viewed as a fundamental principle that requires the equal distribution of educational opportunities regardless of social, economic, or cultural background. This research employs a qualitative method with a literature study approach, in which data are collected from philosophical literature, educational policies, and relevant previous studies. The analysis is carried out through critical interpretation and understanding of justice concepts proposed by philosophers such as John Rawls with the principle of justice as fairness and Paulo Freire with the idea of education as a praxis of liberation. The findings indicate that globalization presents two sides: on one hand, it expands access to digital learning resources and international networks; on the other hand, it deepens inequality due to economic disparities and the digital divide. The quality of learning is significantly influenced by the education system's ability to balance global demands with local values while paying attention to marginalized groups. Therefore, just education must be inclusive, transformative, and contextual, enabling the creation of equitable learning spaces and fostering the development of a socially just society amid the currents of globalization.

A. LATAR BELAKANG

Keadilan sosial dalam pendidikan merupakan salah satu isu fundamental yang terus menjadi perbincangan, terutama di era globalisasi yang sarat dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan sebagai hak asasi manusia tidak hanya dipandang sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga instrumen untuk mencapai kesetaraan sosial. Dalam perspektif filosofis,

keadilan sosial dalam pendidikan berhubungan dengan bagaimana akses dan kualitas belajar dapat terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat (Rawls, 1971).

Globalisasi membawa peluang besar dalam memperluas akses terhadap pendidikan melalui teknologi digital, pertukaran budaya, serta jejaring informasi global. Namun, pada saat yang sama, globalisasi juga melahirkan tantangan berupa kesenjangan digital, komersialisasi pendidikan, dan

marginalisasi kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya paradoks antara cita-cita keadilan sosial dan realitas lapangan (Tilaar, 2009). Menurut John Rawls dalam teori justice as fairness, pendidikan harus menjadi sarana untuk menjamin kesempatan yang adil bagi semua individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok kurang beruntung. Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai praksis pembebasan dari struktur ketidakadilan sosial. Pendidikan yang adil harus mampu membebaskan, memberdayakan, serta mendorong kesadaran kritis peserta didik (Freire, 2005).

Di Indonesia, isu keadilan sosial dalam pendidikan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, sekolah negeri dan swasta, serta siswa dari latar belakang ekonomi tinggi dan rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, baik dari sisi sarana prasarana, tenaga pendidik, maupun akses terhadap sumber belajar (Fahmi, 2017). Selain itu, kebijakan pendidikan nasional yang mengikuti standar global sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal. Hal ini menimbulkan problem baru berupa kesenjangan antara kebutuhan peserta didik dengan sistem pendidikan yang lebih menekankan pada kompetisi global. Dalam kerangka filosofis, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara universalitas pendidikan global dan partikularitas kebutuhan lokal (Suyatno, 2019).

Jurnal-jurnal pendidikan juga menyoroti bahwa kualitas belajar tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga bergantung pada aspek keadilan distribusi sumber daya, keberpihakan pada kelompok rentan, dan penguatan nilai-nilai inklusivitas dalam kurikulum. Hal ini berarti bahwa dimensi keadilan sosial dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya perbaikan struktur sosial secara menyeluruh (Nussbaum, 2011). Dengan demikian, analisis filosofis terhadap keadilan sosial dalam pendidikan menjadi sangat penting. Melalui pendekatan ini, kita dapat meninjau bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan, sekaligus mencari alternatif solusi dalam

menghadapi ketidaksetaraan akses dan kualitas belajar yang semakin menonjol di era globalisasi (Sen, 1999).

Di luar kajian teoritis, realitas pendidikan hari ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara idealitas dan praktik. Banyak anak dari keluarga miskin masih kesulitan mengakses pendidikan bermutu, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat sering kali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki modal ekonomi dan sosial, sementara kelompok lain tetap tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu memberikan keadilan bagi semua kalangan. Kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam pendidikan juga harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kompetisi tanpa memperhatikan aspek keadilan justru akan memperlebar kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa upaya tersebut, pendidikan akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Analisis filosofis dapat membantu menempatkan kembali tujuan pendidikan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, bukan sekadar pada pencapaian angka-angka prestasi akademik. Dengan cara ini, pendidikan dapat menjadi jalan menuju transformasi sosial yang lebih adil.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan yang berkeadilan sosial juga harus mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global, namun tanpa mengorbankan identitas lokal dan keberpihakan pada kelompok marjinal. Akhirnya, penelitian ini hadir untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep keadilan sosial dalam pendidikan dapat dianalisis secara filosofis, dengan menyoroti persoalan akses dan kualitas belajar. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan di era globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan analisis filosofis. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, dan konsep yang bersifat mendalam terkait keadilan sosial dalam pendidikan. Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari teks, literatur, maupun konteks sosial yang relevan. Seperti dijelaskan oleh Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi fenomena yang kompleks dengan memberikan ruang pada interpretasi dan pemaknaan mendalam, sehingga sangat tepat digunakan dalam studi filosofis pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah buku-buku filsafat, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta karya-karya yang relevan tentang globalisasi, keadilan sosial, dan pendidikan. Studi kepustakaan dianggap penting dalam penelitian filosofis karena sumber utama yang dikaji adalah teks yang mengandung gagasan, konsep, dan teori. Menurut Zed (2014), metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti membangun kerangka konseptual dengan mengintegrasikan pandangan para ahli yang berbeda dalam suatu analisis kritis.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutik. Analisis isi digunakan untuk menemukan tema-tema utama dari teks, sementara hermeneutik membantu dalam memahami makna filosofis dari teks tersebut dalam konteks keadilan sosial dan pendidikan. Flick (2014) menegaskan bahwa analisis hermeneutik sangat sesuai dalam penelitian kualitatif karena mampu menggali makna yang tersembunyi di balik teks, khususnya ketika penelitian berfokus pada nilai-nilai, prinsip, dan ide-ide filosofis.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berfokus pada interpretasi teks, tetapi juga melakukan refleksi kritis terhadap realitas sosial pendidikan di era globalisasi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

Keadilan sosial dalam pendidikan merupakan konsep fundamental yang telah lama menjadi perhatian para filsuf, pemikir pendidikan, dan pembuat kebijakan. John Rawls (1971) melalui teori *justice as fairness* menekankan bahwa keadilan menuntut adanya distribusi yang setara terhadap kesempatan dasar, termasuk pendidikan. Pendidikan yang adil berarti setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, memiliki akses yang sama untuk berkembang. Dalam konteks pendidikan, keadilan sosial tidak hanya sebatas akses fisik terhadap sekolah, melainkan juga menyangkut kualitas pembelajaran yang diterima.

Paulo Freire (2005) dalam *Pedagogy of the Oppressed* mengemukakan bahwa pendidikan yang adil harus bersifat dialogis dan membebaskan. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi harus menjadi ruang bagi peserta didik untuk menyadari realitas sosial dan melakukan transformasi. Menurut Freire, keadilan dalam pendidikan terwujud ketika siswa mampu berpikir kritis terhadap ketidakadilan sosial dan mengambil peran aktif dalam memperbaikinya.

Martha Nussbaum (2011) melalui pendekatan *capability* menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi dari kemampuan nyata yang dimiliki peserta didik untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Pendidikan yang berkeadilan sosial harus memberi ruang bagi pengembangan kemampuan tersebut, sehingga siswa memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Hal ini menekankan pentingnya inklusivitas dan pemberdayaan dalam proses belajar.

Menurut Amartya Sen (1999), keadilan sosial dalam pendidikan berkaitan erat dengan kebebasan substantif yang dimiliki seseorang. Pendidikan menjadi salah satu instrumen utama untuk memperluas kebebasan tersebut, karena melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan kapasitas dirinya dan keluar dari keterbatasan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, kualitas

belajar harus dipahami dalam kerangka memperluas kebebasan manusia.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan mengalami transformasi besar yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, mobilitas pengetahuan, dan kompetisi global. Namun, globalisasi juga menimbulkan kesenjangan akses terhadap pendidikan bermutu. Tilaar (2009) menekankan bahwa globalisasi berpotensi memperlebar jurang antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak, sehingga tantangan utama adalah bagaimana memastikan keadilan sosial tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Fahmi (2017) menunjukkan bahwa disparitas pendidikan di Indonesia terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mencakup aspek sarana prasarana, kompetensi guru, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Jika tidak ditangani, kesenjangan ini akan mengakibatkan ketidakadilan sosial yang semakin dalam, karena siswa dari daerah tertinggal sulit memperoleh kualitas belajar yang setara dengan mereka yang berada di perkotaan.

Suyatno (2019) menegaskan bahwa pendidikan harus dipahami sebagai suatu sistem nilai yang menyeimbangkan antara tuntutan global dan kebutuhan lokal. Keadilan sosial dalam pendidikan berarti sistem pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada standar internasional, tetapi juga harus memperhatikan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, kualitas belajar harus diukur secara holistik, bukan hanya dari pencapaian akademik, tetapi juga dari relevansinya dengan kehidupan peserta didik. Dalam banyak jurnal internasional juga mengungkapkan bahwa kualitas belajar sangat dipengaruhi oleh keadilan distribusi sumber daya pendidikan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi digital dapat meningkatkan kualitas belajar, tetapi jika distribusinya tidak merata, maka hanya kelompok tertentu yang akan mendapatkan manfaatnya (OECD, 2020). Hal ini menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.

Keadilan sosial dalam pendidikan juga terkait erat dengan dimensi etika. Menurut Biesta

(2010), pendidikan yang berkeadilan harus mampu memanusiakan peserta didik, bukan sekadar menyiapkan mereka untuk pasar kerja global. Kualitas belajar yang sejati adalah ketika siswa mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya, memahami tanggung jawab sosial, dan berkontribusi pada masyarakat.

Dengan demikian, teori-teori yang telah dikemukakan menunjukkan adanya keterkaitan erat antara keadilan sosial dan kualitas belajar. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat tercapai jika prinsip keadilan sosial diimplementasikan secara konsisten, baik dalam kebijakan maupun praktik pendidikan. Tanpa keadilan, kualitas belajar hanya akan menjadi milik segelintir orang, bukan hak semua warga negara. Di luar kajian teoretis, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita filosofis dan realitas implementasi pendidikan. Lebih jauh lagi, di era globalisasi, keadilan sosial dalam pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tanpa keadilan, globalisasi justru akan memperbesar ketimpangan, sementara pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk memperkecil jurang tersebut.

2. Pembahasan

Keadilan sosial dalam pendidikan merupakan prinsip dasar yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu. Dalam konteks era globalisasi, prinsip ini semakin penting karena pendidikan bukan hanya instrumen pengembangan pribadi, tetapi juga faktor penentu daya saing bangsa di kancah internasional. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan kualitas belajar masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Analisis filosofis memberikan pemahaman mendalam bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi fasilitas, tetapi juga menyangkut nilai, makna, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkeadilan harus menjawab kebutuhan individu dan masyarakat secara

seimbang, bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja terampil. Dari perspektif ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan pembebasan, sehingga setiap peserta didik memiliki peluang untuk berkembang secara optimal.

Akses pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Kesenjangan antara kota dan desa, antara sekolah negeri dan swasta, serta antara siswa kaya dan miskin menunjukkan adanya ketidakadilan yang nyata. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan, masih banyak anak yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi maupun geografis. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara idealitas keadilan sosial dengan kenyataan di lapangan.

Kualitas belajar juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, kompetensi pendidik, dan relevansi kurikulum. Sekolah yang memiliki akses terhadap teknologi dan guru berkualitas tentu lebih mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dibandingkan sekolah dengan sumber daya terbatas. Dalam hal ini, globalisasi justru memperlebar kesenjangan, karena hanya kelompok tertentu yang mampu memanfaatkan teknologi pendidikan secara maksimal. Di sisi lain, globalisasi membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas belajar melalui akses terhadap sumber pengetahuan global, kolaborasi lintas negara, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, peluang ini hanya dapat dirasakan secara adil apabila distribusi sumber daya dilakukan secara merata. Tanpa keadilan distribusi, teknologi hanya akan memperkuat dominasi kelompok tertentu dan meninggalkan kelompok lain semakin jauh.

Analisis filosofis juga menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga mencakup upaya menciptakan ruang belajar yang inklusif. Inklusivitas berarti menerima keberagaman peserta didik, baik dari segi latar belakang sosial, budaya, maupun kemampuan. Pendidikan yang eksklusif hanya akan memperkuat diskriminasi dan memperlebar

jurang sosial.

Di tengah arus globalisasi, pendidikan sering kali terjebak pada orientasi kompetisi global yang menekankan pencapaian akademik semata. Padahal, kualitas belajar yang sejati bukan hanya tentang nilai ujian atau prestasi internasional, melainkan juga tentang sejauh mana pendidikan dapat membentuk manusia yang utuh, kritis, dan memiliki kepedulian sosial. Pendidikan yang berkeadilan harus mampu mengembangkan potensi kognitif sekaligus nilai kemanusiaan peserta didik. Keadilan sosial dalam pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan. Kebijakan yang berorientasi pada standar internasional sering kali mengabaikan kebutuhan lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan pendidikan dengan konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tuntutan global dan kearifan lokal.

Selain kebijakan, peran guru juga sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial di ruang kelas. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator yang dapat mendorong terciptanya interaksi belajar yang setara. Dengan pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, guru dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran kritis sekaligus membangun solidaritas sosial di antara peserta didik.

Dari sudut pandang filosofis, pendidikan yang berkeadilan sosial memiliki misi transformatif. Pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian akademik, melainkan harus berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Ketika peserta didik dibekali dengan kesadaran kritis, mereka dapat berkontribusi dalam memperbaiki struktur sosial yang timpang dan membangun masyarakat yang lebih adil. Realitas menunjukkan bahwa tantangan keadilan sosial dalam pendidikan tidak bisa diatasi hanya dengan menyediakan fasilitas. Dibutuhkan paradigma baru yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap aspek pendidikan. Paradigma ini harus diterapkan mulai dari

perumusan kebijakan, desain kurikulum, hingga praktik pembelajaran sehari-hari.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, pendidikan dapat menjadi instrumen yang benar-benar memberdayakan. Pendidikan yang adil akan melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial dan komitmen terhadap perubahan. Pada titik ini, kualitas belajar bukan hanya diukur dari seberapa jauh siswa memahami materi, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menerapkan pengetahuan untuk kebaikan bersama.

Akhirnya, analisis filosofis terhadap keadilan sosial dalam pendidikan di era globalisasi menunjukkan bahwa akses dan kualitas belajar merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa akses yang setara, kualitas belajar akan menjadi hak eksklusif segelintir orang. Sebaliknya, tanpa kualitas belajar yang baik, akses pendidikan akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, pendidikan yang berkeadilan sosial adalah pendidikan yang mampu menjamin keduanya sekaligus, sehingga dapat menjadi pondasi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan inklusif di tengah arus globalisasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mandiri ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan merupakan fondasi penting bagi terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan transformatif. Akses pendidikan yang setara dan kualitas belajar yang merata harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tanpa keadilan sosial, pendidikan akan kehilangan fungsi dasarnya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mempersempit kesenjangan sosial.

Analisis filosofis memperlihatkan bahwa keadilan sosial tidak hanya menyangkut distribusi sarana pendidikan, tetapi juga melibatkan pemaknaan mendalam tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkeadilan adalah pendidikan yang mampu membebaskan, memberdayakan, serta menumbuhkan kesadaran kritis pada peserta didik. Dalam kerangka ini, akses dan kualitas belajar harus dipahami sebagai satu

kesatuan yang saling melengkapi, bukan dua hal yang berdiri sendiri.

Di era globalisasi, pendidikan dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara tuntutan kompetisi global dengan kebutuhan lokal. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan utama, pendidikan dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang membentuk manusia seutuhnya, kritis, serta peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, pendidikan yang berkeadilan sosial bukan hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi juga keharusan praktis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing.

DAFTAR RUJUKAN

- Biesta, G. (2010). *Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy*. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Fahmi, M. (2017). "Disparitas Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan*, 18(2), 112-125. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- OECD. (2020). *Education in the Digital Age: Challenges and Opportunities*. Paris: OECD Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Suyatno. (2019). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.